



Gaji Pegawai Pemkot Yogya Terancam Ditunda

YOGYAKARTA (SINDO) - Kenaikan gaji dan pangkat karyawan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di tahun anggaran 2009 terancam tertunda. Gara-garanya, pemerintah dan Dewan belum menemuai kesepakatan atas susunan kelembagaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2007.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kelembagaan Bagus Sumbarja mengatakan, sesuai PP 41, mulai tahun anggaran 2009 setiap daerah harus sudah memiliki Struk-



HERRY ZUDIANTO

tur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Jika belum, maka pangkat dan kenaikan gaji pegawai tidak bisa dilakukan.

"Ini yang dikhawatirkan, selain juga bisa menghambat pembahasan APBD murni 2009," katanya kepada wartawan kemarin.

Menurut dia, saat ini pembahasan kelembagaan sudah diundur tiga kali. Antara pihak eksekutif dan legislatif masih bersikukuh dengan pendapat masing-masing.

bersambung ke hal 14

Gaji Pegawai Pemkot Yogya Terancam Ditunda

sambung dari hal 13

Pemerintah menginginkan agar kelembagaan lama tetap dipertahankan, mengingat beban kerja eksekutif tinggi. Sementara, Dewan berpikir kelembagaan yang ada saat ini 'kegemukan' dan tidak sinkron dengan PP 41.

"Beberapa lembaga yang akan dirampingkan masih jadi tarikulur. Di antaranya soal Badan Pengelolaan Barang Daerah (BPKD) yang menu-

rut kami perlu dibubarkan tapi mereka (eksekutif) tetap ingin mempertahankan," katanya.

Maksud dari perampingan ini, sambung Bagus, diharapkan bisa menekan beban anggaran untuk mendanai kelembagaan. Dia mencontohkan APBD 2008, beban belanja tidak langsung yang dikurangi hibah dan bantuan sosial lebih dari 52%. Hal ini dinilai akan mengurangi pos belanja langsung di mana pos

tersebut bersentuhan dengan masyarakat.

"Efisiensi dan optimalisasi struktur kelembagaan pemerintah daerah mutlak diperlukan, bukannya untuk lebih memaksimalkan pembangunan, tapi bisa jadi titik awal reformasi administrasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri," terangnya.

Sementara Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto dalam rapat paripurna penyampaian nota kebijakan umum

anggaran di Gedung DPRD kemarin memberikan *warning* Dewan. Dia meminta agar wakil rakyat tidak menngulur-ulur pembahasan SOTK. Pihaknya memberikan batasan akhir penyelesaian pembahasan kelembagaan ini maksimal akhir Oktober 2008.

Menurut dia, jika sampai batas waktu tersebut tidak juga dituntaskan, maka akan mengacu pada kelembagaan yang ada sekarang ini dalam penyusunan APBD 2009. Dengan menggunakan acuan tersebut maka pemerintah mau tidak mau harus siap menerima segala konsekuensi yang dikenakan pemerintah pusat.

"Kalau belum juga ditetapkan, maka kelembagaan tahun sebelumnya yang menjadi dasar penyusunan APBD. Kelembagaan bisa diimplementasikan tahun anggaran 2010," katanya. (arif budianto)

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera
2. <i>Bag. Organisasi</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3. <i>BPKD</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		
6.		

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 26 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005